

BAB III
ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
 - a. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Guna mencapai Kabupaten Pati Bumi Mina Tani Sejahtera, arah pembangunan dan strategi jangka panjang selama kurun waktu dua puluh tahun (2005-2025) adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya, yang ditandai dengan :
 - a. peningkatan sikap dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan;
 - c. peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan;
 - d. peningkatan profesionalisme dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pemerataan distribusi guru;
 - e. peningkatan standar hidup yang layak dengan peningkatan pendapatan, ketersediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan dan penumbuhan jati diri pribadi;
 - f. peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesejahteraan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
 - g. pengembangan system pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, sehingga dapat menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan; dan
 - h. peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban demi tegaknya hukum sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat.
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang ditandai dengan :
- a. pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, berdaya saing serta mampu menembus pasar global;

- b. peningkatan kerja sama strategis dan sinergis antar pelaku usaha untuk mengembangkan rumpun industri, mempercepat alih teknologi;
- c. pengembangan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- d. peningkatan perekonomian daerah yang berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi dengan memperhatikan terjaminnya kesempatan berusaha dan bekerja sebagai bagian penanggulangan kemiskinan;
- e. peningkatan revitalisasi usaha pertanian dan perikanan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. optimalisasi usaha pertambangan dengan adanya kepastian regulasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk pencapaian kemakmuran masyarakat;
- g. peningkatan keamanan stok/penyediaan dan distribusi pangan dengan mengembangkan produktivitas pertanian daerah, yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- h. peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan;
- i. peningkatan usaha rehabilitasi hutan dan konservasi lahan yang didukung partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan;
- j. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi guna mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan di daerah dan mampu menciptakan usaha peluang mandiri dengan jiwa wirausaha; dan
- k. peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya regenerasi yang dapat diperbaharui dan tidak menimbulkan dampak merusak lingkungan.

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang ditandai dengan :
 - a. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, tanggung jawab dan menjamin efisiensi dan efektivitas pemanfaatan guna terwujudnya fungsi lembaga pengelolaan keuangan daerah yang optimal;
 - b. peningkatan pemberdayaan aparatur pemerintah yang bersih dan cakap serta ditunjang sarana dan prasarana pelayanan yang memadai untuk menuju tata pemerintahan yang baik;
 - c. pengembangan kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan kajian dan analisis disertai dengan data yang valid dan akurat;
 - d. peningkatan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat yang difasilitasi dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat;
 - e. peningkatan pembangunan aparatur guna mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan tanggap dalam merespon tuntutan, kebutuhan dan perkembangan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
 - f. peningkatan kelembagaan kearsipan daerah yang didukung sarana prasarana yang memadai serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan dan perpustakaan; dan
 - g. pengembangan sistem informasi manajemen daerah melalui pembangunan dan pengembangan beberapa sistem informasi di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan. Yang ditandai dengan :

- a. peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air dan irigasi yang diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah, ketersediaan air, jaringan irigasi dengan pengelolaan yang optimal;
 - b. peningkatan infrastruktur perumahan yang diarahkan pada pemenuhan lingkungan perumahan yang sehat;
 - c. pengembangan penanganan persampahan berbasis masyarakat;
 - d. pembangunan infrastruktur keciptakaryaan yang mendorong pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah yang optimal dan berkelanjutan;
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan beserta perlengkapan pendukung guna mewujudkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
 - f. pengembangan sistem pembangunan penataan ruang yang diarahkan pada pembangunan wilayah yang terpadu, efisien serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan;
 - g. peningkatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah disekitarnya yang masih tertinggal; dan
 - h. peningkatan kualitas dan efektifitas serta penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian di bidang penataan ruang.
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah, yang ditandai dengan :
- a. pengembangan investasi yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menjamin kepastian berusaha serta pemenuhan sarana prasarana yang mendukung investasi;

- b. penguatan basis industri yang mempunyai daya saing melalui pendekatan klaster sehingga menumbuhkan keseimbangan peran dan pelaku industri dengan UMKM;
 - c. peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha guna mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha perkoperasian;
 - d. peningkatan kerja sama antar pelaku usaha berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan mandiri;
 - e. peningkatan ketrampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tuntutan pasar kerja; dan
 - f. pengembangan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan regulasi dan perijinan yang efisien dan efektif dalam melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat.
6. Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal, yang ditandai dengan:
- a. peningkatan pembangunan budaya daerah yang diarahkan pada pengembangan seni dan budaya melalui pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan leluhur guna membentuk nilai kepribadian masyarakat yang bermartabat;
 - b. peningkatan potensi obyek wisata yang dikelola dan dilestarikan secara proporsional yang diarahkan untuk pengembangan kuantitas obyek wisata dan didukung dengan pengelolaan yang profesional;
 - c. peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal di bidang pariwisata untuk memperluas kesempatan kerja guna mendorong kegiatan ekonomi daerah;
 - d. peningkatan karakter masyarakat yang berbudaya berdasarkan pada kearifan lokal dan jati diri melalui pengembangan mekanisme masyarakat sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan

e. pengembangan budaya inovatif berorientasi Iptek dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka pengembangan tradisi.

b. Visi dan Misi

A. Visi

Berdasarkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Pati serta tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu dua puluh tahun mendatang maka dirumuskan visi pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 - 2025 : " Pati Bumi Mina Tani Sejahtera". Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Pati yang harus dapat diukur guna mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan dan keberhasilan yang ingin dicapai. Pengertian makna visi secara utuh adalah sebagai berikut :

Pati : daerah otonom dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bumi : merupakan satu kesatuan wilayah dengan potensi alam dan keanekaragaman hayati serta budaya sebagai modal dasar pembangunan daerah.

Mina : menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat yang memiliki potensi wilayah perikanan laut dan perikanan darat yang potensial untuk diolah dan dikembangkan.

Tani : merupakan gambaran masyarakat dalam mengolah potensi sumber daya alam di bidang pertanian, perkebunan maupun kehutanan dengan tetap menjaga kelestarian alam.

Sejahtera : merupakan kondisi kemakmuran suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil), sosial maupun spirituil, dengan ditandai adanya peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olahraga, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur yang mampu mendukung pembangunan daerah.

Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Pati. Visi pembangunan daerah tersebut diukur untuk dapat mengetahui tingkat perkembangan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, kedamaian dan kesejahteraan yang ingin dicapai. Berdasarkan visi jangka panjang tersebut serta sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah maka dirumuskan visi pembangunan daerah tahun 2017-2022 adalah : "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik".

Dalam visi pembangunan daerah tahun 2017-2022 tersebut terdapat empat gagasan pokok dan yang menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pati yaitu :

1. **MENINGKATNYA** : upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk menambah atau menaikkan dari kondisi yang telah ada dari segi kuantitas maupun kualitas.

2. KESEJAHTERAAN : kondisi masyarakat Kabupaten Pati yang terpenuhi kebutuhan ekonomi(materiil), sosial maupun spiritual dengan ditandai adanya peningkatan pendapatan, menurunnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan indeks pembangunan manusia, meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial tersedianya infrastruktur yang memadai serta meningkatnya profesionalisme aparatur yang mampu mendukung pembangunan daerah.
3. MASYARAKAT : seluruh masyarakat Kabupaten Pati.
4. PELAYANAN PUBLIK : memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh hak dan kewajibannya.

Visi tersebut memuat dua unsur fokus cita-cita, yaitu: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan (2) meningkatnya pelayanan publik. Penjelasan unsur visi Kabupaten Pati dan indikatornya disusun dalam kerangka makro tujuan pembangunan daerah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Penjelasan visi

UNSUR VISI	PENJELASAN	SUBUNSUR VISI
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan tujuan pemerintah daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Penjelasan Pasal 31 menyebutkan " <i>mempercepat</i>	1.Pembangunan Kualitas Manusia 2.Kesejahteraan Ekonomi 3.Kesejahteraan Sosial 4.Rasa aman dan nyaman untuk tinggal dan bekerja

UNSUR VISI	PENJELASAN	SUBUNSUR VISI
	<p><i>peningkatan masyarakat</i>”</p> <p>peningkatan pembangunan manusia yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat.</p> <p>Sejahtera direpresentasikan dengan konsep terpenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, rasa aman dan nyaman, serta kemajuan sarana prasarana wilayah secara adil dan merata.</p> <p>a) Aman mencerminkan Kondusivitas wilayah mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Aman berarti juga kesiagaan perlindungan atas resiko kejadian bencana alam dan bencana sosial</p> <p>b) Nyaman, berarti mengembangkan sebagai daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, tempat persinggahan, rekreasi, dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Nyaman berarti juga lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi.</p> <p>Kesejahteraan ekonomi direpresentasikan dengan tingginya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli untuk</p>	5.Lingkungan hidup yang sehat berkelanjutan

UNSUR VISI	PENJELASAN	SUBUNSUR VISI
	memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.	

Tabel 3.1 Penjelasan visi (lanjutan)

UNSUR VISI	PENJELASAN	SUBUNSUR VISI
	Kesejahteraan sosial merefleksikan kehadiran pemerintah, terutama untuk kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial juga ditandai oleh kemajuan kreatifitas seni dan budaya masyarakat.	

UNSUR VISI	PENJELASAN	SUBUNSUR VISI
MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK"	<p>Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Undang-undang No. 23 tahun 2014 Pasal 344). Kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima memerlukan kinerja aparatur, kelembagaan, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel. Selain itu, hal tersebut juga memerlukan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima membutuhkan pengelolaan sumberdaya yang efektif dan efisien.</p> <p>Kemajuan sarana prasarana wilayah secara adil dan merata, dapat diposisikan sebagai bagian dari pelayanan publik yang wajib disediakan pemerintah, karena menjadi faktor utama untuk mendukung keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan ketersediaan infrastruktur di</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan barang dan jasa bagi masyarakat (pendidikan, kesehatan, papan, pelayanan administrasi dan perijinan usaha, pelayanan umum lainnya) 2. Profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas pemerintahan 3. Implementasi teknologi Informasi 4. Kemajuan sarana prasarana wilayah

UNSUR VISI	PENJELASAN	SUBUNSUR VISI
	<p>seluruh wilayah kabupaten Pati, baik di pusat kabupaten, pinggir kabupaten, maupun di lokasi-lokasi sekitar perbatasan dengan Kabupaten lain merupakan hal sangat mendesak demi terpenuhinya aspek pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.</p>	

Visi Kabupaten Pati 2017-2022 mencapai dua keadaan ideal yaitu: (i) meningkatnya kesejahteraan rakyat, dan (ii) meningkatnya kualitas pelayanan publik. Landasan dasar sebagai komponen utamanya adalah: (i) pemerintah yang berkemampuan dan akuntabel, dan (ii) masyarakat yang berdaya. Pemerintah memainkan peran sebagai regulator, distributor dan alokator sumberdaya untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Warga memainkan peran sebagai produsen, mitra, dan juga pengawas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat.

B. Misi

Untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025 ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya.

Kondisi kehidupan masyarakat ini ditandai dengan meningkatnya karakter masyarakat yang berperilaku agamis, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang mampu menumbuhkan semangat gotong royong, yang berbudi luhur dengan tetap melestarikan kearifan budaya lokal, bersikap kompetitif dan dinamis, sehingga tercipta kondisi asah, asih dan asuh yang mampu mengayomi rasa aman dan damai serta dengan tetap meningkatkan konsistensi penegakan hukum.

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan

Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan potensi sumber daya alam sektor pertanian, perikanan dan pertambangan serta pengembangan IPTEK yang mampu menumbuhkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai komponen pendukung dalam peningkatan perekonomian daerah berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Yang ditandai dengan semakin meningkatnya kinerja tata pemerintahan (*good governance*) yang selalu memenuhi etos kerja partisipasi yang aspiratif, konsistensi peraturan perundangan, transparansi, responsif, demokratis, proporsional yang tidak diskriminatif, efektif dan akuntabel, sehingga terwujud perilaku yang terpuji dengan mengedepankan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada terciptanya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang dan mampu menumbuhkan kemandirian daerah yang mendapat dukungan dari segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan.

Yang ditandai dengan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi sebagai dasar dalam pembangunan prasarana dan sarana, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor pendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh, sesuai RTRW yang telah ditetapkan.

5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah.

Yang ditandai dengan adanya reformasi perijinan investasi yang responsif penuh dengan kemudahan baik dari aspek prosedur, waktu maupun aspek finansial, sehingga terciptanya iklim investasi yang kondusif, yang mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan daya saing daerah.

6. Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal. Yang ditandai dengan pengembangan eksistensi budaya daerah dan nilai-nilai tradisional, peningkatan sarana prasarana potensi obyek wisata yang dikelola dan proporsional. Hal tersebut perlu adanya dukungan masyarakat yang mendasarkan pada kearifan lokal.

Sedangkan perwujudan visi pembangunan daerah 2017-2022 ditempuh melalui 8 (delapan) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut.

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industry;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah; dan
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 3.2. Prioritas RPJPD Kabupaten Pati 2005-2025 dan prioritas RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022

No	RPJPD Kabupaten Pati 2005-2025	Prioritas RPJMD Pati 2017-2022
1.	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya.	<p>1. Agenda 1: Pembangunan Karakter unggul masyarakat dan Pelestarian kekayaan budaya lokal.</p> <p>2. Agenda 2: Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.</p>
2.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Agenda 3: Pemberdayaan masyarakat.
3.	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme	<p>Agenda 4:</p> <p>Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel.</p>
4.	Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan	Agenda: 7 Pembangunan infrastruktur
5.	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah	<p>1. Agenda 5: Investasi, UMKM dan perluasan penyerapan tenaga kerja</p> <p>2. Agenda 6: Penguatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.</p>

No RPJPD Kabupaten Pati 2005-2025 Prioritas RPJMD Pati 2017-2022

- 6 Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal
1. Agenda 5: pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.
 2. Agenda 1: Pembangunan Karakter unggul masyarakat dan Pelestarian kekayaan budaya lokal
 3. Agenda 7: Pembangunan infrastruktur
-

2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

a. Arah Kebijakan

Keberadaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan (kelitbangan) serta pelaksanaan inovasi di lingkup Pemerintah Daerah secara jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi kelitbangan di kabupaten/kota dilaksanakan melalui penyelenggaraan 7 kegiatan yang disebut sebagai kelitbangan utama yang terdiri dari penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan kelitbangan utama berorientasi pada kualitas hasil, *outcome*, dan mendukung inovasi. Kelitbangan utama bertujuan untuk menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, perangkat litbang daerah di kabupaten/kota juga melaksanakan kelitbangan pendukung yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama. Kegiatan kelitbangan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang pada akhirnya berujung pada tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di segala bidang.

Tabel 3.3. Jenis kelitbangan utama dan keluarannya

No	Jenis	Keluaran
1.	Penelitian	Rekomendasi
2.	Pengkajian	Rekomendasi
3.	Pengembangan	Naskah Akademis, Ranc. Regulasi, Pemodelan Kebijakan/Program
4.	Perekayasa	Pedoman Umum/Teknis Pelaksanaan
5.	Penerapan	Uji coba Model Kebijakan/Program pada daerah percontohan
6.	Pengoperasian	Penerapan Model Kebijakan/Program secara lebih luas/menyeluruh dan pendampingan
7.	Evaluasi Kebijakan	Rekomendasi (lanjut dengan perbaikan atau dicabut)

Sumber : Permendagri No. 17 Tahun 2016

Kebijakan kelitbangan adalah serangkaian kebijakan yang akan ditempuh oleh Perangkat litbang daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Terdapat 3 aspek penting yang menjadi arah penyelenggaraan kelitbangan di Kabupaten Pati yaitu : 1). penguatan kebijakan berbasis kelitbangan; 2) penguatan inovasi; dan 3) penguatan kelembagaan kelitbangan. Oleh karena itu, kebijakan kelitbangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati diarahkan untuk : 1). mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2) mendorong penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 3) mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Kebijakan kesatu yang berfokus pada aspek penguatan kebijakan berbasis kelitbangan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan misi keempat pembangunan daerah yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik” sehingga indikator kelitbangan terkait yaitu persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dapat tercapai. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/3522/SJ tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah disebutkan bahwa kegiatan kelitbangan di daerah dilaksanakan secara satu pintu di perangkat litbang daerah.

Pelaksanaan kelitbangan secara satu pintu bukan berarti bahwa perangkat litbang daerah menjadi satu-satunya pelaksana kelitbangan di daerah. Kelitbangan dapat dilakukan di masing-masing perangkat daerah namun harus direncanakan dan dikoordinir oleh perangkat litbang daerah dan topik-topik kelitbangan harus sesuai dan mengacu pada rencana induk kelitbangan. Kelitbangan yang dilakukan oleh perangkat daerah harus sesuai dan menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut misalnya pengukuran, pengambilan data, survey yang bersifat rutin/reguler, naskah akademik, studi kelayakan dan sebagainya. Perangkat daerah tersebut telah memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang mencukupi. Selanjutnya kelitbangan yang dilaksanakan perangkat daerah dilaporkan dan dinventarisir oleh perangkat litbang daerah untuk kelengkapan database kelitbangan dan pada akhirnya dapat diketahui persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah. Pelaksanaan kelitbangan secara satu pintu bertujuan untuk menghindari duplikasi, meningkatkan sinkronisasi, dan agar efektif dalam pencapaian visi misi pembangunan daerah.

Kebijakan kedua yang berfokus pada aspek penguatan inovasi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan misi keempat pembangunan daerah yaitu “Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri” sehingga indikator kelitbangan yang terkait yaitu persentase inovasi yang sudah terbentuk menjadi sistem inovasi daerah (SIDa) dapat tercapai.

Inovasi daerah diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sasaran inovasi daerah antara lain : 1). pengembangan kreativitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berorientasi inovasi; 2). terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan inovasi daerah; 3). terselenggaranya upaya menumbuhkembangkan inovasi di daerah; 4). terbudayakannya inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 5). terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, manajemen pemerintahan daerah, aktivitas perekonomian daerah, dan aktivitas masyarakat; dan 6). peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui : 1). peningkatan pelayanan publik; 2). pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan b. peningkatan daya saing daerah.

Inovasi daerah diselenggarakan berdasarkan 8 prinsip yaitu : 1). peningkatan efisiensi; 2). perbaikan efektivitas; 3). perbaikan kualitas pelayanan; 4). tidak menimbulkan konflik kepentingan; 5). berorientasi kepada kepentingan umum; 6). dilakukan secara terbuka; 7). memenuhi nilai kepatutan; dan 8). dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Bentuk-bentuk inovasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu : 1). inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; 2). inovasi pelayanan publik; dan/atau 3). Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kebijakan ketiga yang berfokus pada aspek penguatan kelembagaan kelitbangan diarahkan agar BAPPEDA sebagai perangkat litbang daerah mampu berjalan secara mandiri maupun bersama-sama dengan institusi/lembaga kelitbangan (perguruan tinggi, lembaga penelitian, dewan riset daerah, dll) mampu menjalankan fungsi kelitbangan dan berperan sebagai pelaksana teknis dalam mengkoordinasi inovasi daerah.

Penguatan kelembagaan kelitbangan bersifat ke dalam yang artinya bagaimana sebagai perangkat litbang daerah, BAPPEDA memiliki sumber daya yang mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas. Penguatan kelembagaan bersifat keluar artinya bagaimana sebagai perangkat litbang daerah harus dapat merangkul dan bekerjasama dengan semua pihak maupun lembaga agar fungsi kelitbangan dapat dilaksanakan secara optimal.

c. Strategi

Dengan memperhatikan arah kebijakan kelitbangan maka disusunlah strategi agar tujuan pelaksanaan kelitbangan dan inovasi daerah di Kabupaten Pati dapat tercapai.

1. Arah kebijakan kelitbangan untuk mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan melalui strategi antara lain:
 - a. Penyiapan landasan regulasi/kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, khususnya berkenaan dengan program legislasi daerah (Prolegda) yang menjadi kebutuhan perangkat daerah;
 - b. Evaluasi dan penyiapan rekomendasi atas pelaksanaan regulasi/kebijakan dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta meminimalisir “Perda bermasalah”;
 - c. Pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan daya saing daerah, serta dukungan pencapaian prioritas daerah;
 - d. Penyiapan kerangka kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi jangka panjang; dan
 - e. Asistensi penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD, dan APBD serta evaluasi kinerja perangkat daerah setiap tahun.

2. Arah kebijakan kelitbangan untuk mendorong penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan melalui strategi antara lain:
 - a. Pembinaan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) guna menumbuhkembangkan suasana yang kondusif bagi terciptanya inovasi di daerah;
 - b. Fasilitasi dan implementasi kebijakan dan program inovasi di daerah yang bersumber dari hasil invensi dan difusi; dan
 - c. Evaluasi, pelaporan, dan penilaian atas pelaksanaan inovasi di daerah.

3. Arah kebijakan kelitbangan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan penguatan kapasitas kelembagaan diwujudkan melalui strategi antara lain:
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelitbangan, khususnya pemenuhan kebutuhan Pejabat Fungsional Peneliti secara bertahap melalui rekrutmen reguler, alih fungsi dan/atau *inpassing* sesuai ketentuan perundang-undangan (diutamakan berkualifikasi pendidikan S2 dan S3);
 - b. Peningkatan kualitas dan sinergitas program kelitbangan dengan melibatkan para pemangku kepentingan;
 - c. Memperkuat kerjasama dengan instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati maupun institusi/lembaga kelitbangan lain terutama dalam pemecahan permasalahan melalui pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan.
 - d. Memenuhi kelengkapan organisasi kelitbangan (Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu & Tim Kelitbangan);
 - e. Diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangan; dan
 - f. Peningkatan fasilitas pendukung kelitbangan (*website, open journal system, perpustakaan, aplikasi kelitbangan, dll*).

Tabel 3.4. Tujuan dan sasaran jangka menengah kelitbangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas regulasi kebijakan pembangunan berbasis kajian analisis	Meningkatnya kualitas dan kajian analisis kebijakan pembangunan	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk menjadi kebijakan daerah	75,7	80,2	85,1	90,2	95,6
Mengembangkan inovasi dan daya saing daerah	Meningkatnya inovasi daerah kemajuan masyarakat	1.Jumlah inovasi yang sudah terbentuk menjadi sistem inovasi daerah (SIDa) 2.Jumlah karya Iptek yang didaftarkan HAKI	5 3	10 5	15 8	20 10	25 15
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jaringan kelitbangan.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan jaringan kelitbangan	1.Jumlah kerja sama kelitbangan yang dilakukan.	2	3	5	5	6

2. Jumlah publikasi hasil kelitbangan dalam media berskala nasional atau internasional.	4	5	7	9	10
3. Persentase pejabat fungsional peneliti dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan minimal S2.	75	75	80	80	85

3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah

Indikasi program-program prioritas kelitbangan disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) misi pembangunan daerah; 2) urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 3) program prioritas dan program unggulan daerah; dan 4) isu-isu strategis.

Selanjutnya, program-program prioritas kelitbangan daerah dikelompokkan dalam 4 bidang yaitu : (i) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; (ii) Bidang Ekonomi; (iii) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan (iv) Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek. Pengelompokan 4 bidang prioritas kelitbangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 serta disesuaikan dengan struktur organisasi perangkat litbang daerah (BAPPEDA).

Pengelompokan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah disajikan pada Tabel 3.6. Terdapat 3 sektor yang menjadi unggulan RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 yaitu sektor pariwisata, perikanan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Program-program unggulan RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 disajikan pada Tabel 3.7. Program-Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 3.8. Program-program prioritas kelitbangan daerah 2017-2022 disajikan pada Tabel 3.9-3.12

Dalam bagian ini juga ditampilkan kebutuhan ideal Pejabat Fungsional Peneliti guna mendukung optimalisasi fungsi kelitbangan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA. Salah satu isu penting terkait fungsi kelitbangan dalam mendukung kebijakan dan inovasi daerah adalah luasnya cakupan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta banyaknya program-program unggulan maupun strategis yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pati. Dari sisi ini, dapat dilihat masih belum berimbang jumlah sumber daya kelitbangan terutama Pejabat Fungsional Peneliti dengan fungsi kelitbangan yang harus didukung. Guna mengatasi hal tersebut maka perlu adanya peningkatan jumlah Pejabat Fungsional Peneliti dengan kepakaran diarahkan untuk menunjang pencapaian program-program prioritas kelitbangan daerah. Proyeksi kebutuhan Pejabat Fungsional Peneliti BAPPEDA Kabupaten Pati sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.5. Pengelompokan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

Pemerintahan dan Sosial Budaya	dan	Ekonomi	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Pendidikan		Tenaga kerja	Lingkungan hidup
Kesehatan		Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Pekerjaan umum dan penataan ruang
Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat		Kepemudaan dan olah raga	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Sosial		Penanaman modal	Pertanahan
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	dan	Pariwisata	Komunikasi dan informatika
Pangan		Kelautan dan perikanan	Perhubungan
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	dan	Pertanian	
Pemberdayaan masyarakat desa		Perdagangan	
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana		Perindustrian	
Kebudayaan		Transmigrasi	
Perpustakaan			
Kearsipan			

Tabel 3.6. Program-program unggulan RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022

Pariwisata	Perikanan	Usaha Mikro, Kecil & Menengah
Program pengembangan destinasi pariwisata	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar	Program peningkatan kualitas koperasi
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Program pengembangan perikanan tangkap (Pemb. Pelabuhan Banyutowo)	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Tabel 3.7. Program-program prioritas RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022

Pemerintahan dan Sosial Budaya	Ekonomi	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Program Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	Program peningkatan pengendalian polusi
Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Program pengembangan budidaya perikanan	Program pengelolaan ruang terbuka hijau
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Perlindungan konsumen dan pengamanan	Program peningkatan jalan dan jembatan
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatann efisiensi perdagangan dalam negeri	Program pembangunan jalan dan jembatan

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Program pengembangan sentra industri potensial.	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Program keluarga berencana	Peningkatan kemampuan teknologi industry	Program pembangunan saluran drainase/gorong – gorong

Tabel 3.7. Program-Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (lanjutan)

Pemerintahan dan Sosial Budaya	Ekonomi	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Program pengembangan wilayah strategi dan cepat tumbuh
Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Program pengembangan sentra industri potensial	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Program penyediaan air baku

Program pendidikan karakter siswa	Program peningkatan hasil peternakan	Program lingkungan sehat perumahan
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Program pengembangan nilai budaya	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
Program pengelolaan kekayaan budaya	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Program koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang tata pemerintahan
Program upaya kesehatan masyarakat	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang organisasi dan SDM
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kesra
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Program peningkatan produksi hasil peternakan	
Program pemeliharaan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pusk Pembantu dan Jaringan/RS	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	
Program standarisasi pelayanan kesehatan	Program peningkatan kesempatan kerja	

Tabel 3.7. Program-program prioritas RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (lanjutan)

Pemerintahan dan Sosial Budaya	Ekonomi	Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	
Program peningkatan pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin (Jamkesda)	Program peningkatan peran serta kepemudaan	
Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "RAA Soewondo"	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	
Program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD RSUD "Kayen"	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.	
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan (Inspektorat)	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (BPKAD)	

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Program pendidikan kedinasan

3.3.1. Program Prioritas Kelitbangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Tabel 3.8. Program-program prioritas kelitbangan bidang pemerintahan dan sosial budaya

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat daerah terkait
Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Penegakan peraturan daerah	2017-2022	SATPOL PP
		Penyakit masyarakat, kriminalitas dan pelanggaran K3	2017-2022	SATPOL PP
	Tercapainya cakupan pelayanan administratif publik	Layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	2017-2022	DISDUKCAPIL
	Meningkatkan aktualisasi pelestarian seni dan budaya	Pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai nilai budaya	2017-2022	DISDIKBUD

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.	Meningkatnya kesehatan masyarakat	status gizi	Partisipasi masyarakat dalam berperilaku hidup sehat	2017-2022	DINKES
			Akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas	2017-2022	DINKES
			Kepemilikan dan layanan jaminan kesehatan di masyarakat	2017-2022	DINKES
			Akses pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas	2017-2022	DINSOS
Meningkatnya pemerataan pendidikan	kualitas dan akses		Pemerataan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	2017-2022	DISDIKBUD
			Pemerataan distribusi dan kualitas tenaga pengajar	2017-2022	DISDIKBUD
			Akses dan kualitas layanan pendidikan dasar termasuk perpustakaan	2017-2022	DISDIKBUD, ARPUSDA

Tabel 3.8. Program-program prioritas kelitbangn bidang pemerintahan dan sosial budaya (lanjutan)

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat daerah terkait
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.	Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender)	Kesenjangan gender di sektor pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja	2017-2022	DINSOS
		Perencanaan dan penganggaran kebijakan/program/kegiatan responsif gender	2017-2022	DINSOS
	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Desa mandiri pangan	2017-2022	KETAPANG
Penanganan kawasan rawan pangan		2017-2022	KETAPANG	
Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Terwujudnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa	Pengembangan desa mandiri	2017-2022	DISPERMADES
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Perlindungan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	2017-2022	DINSOS
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kompeten	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten	Layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	2017-2022	DISDUKCAPIL
		Pengintegrasian sistem jaringan arsip daerah dan	2017-2022	ARPUSDA

mengutamakan pelayanan publik		digitalisasi daerah	dokumen/arsip		
		Realisasi pencapaian RPJMD		2017-2022	BAPPEDA
	Reformasi birokrasi	Manajemen Negara	Aparatur Sipil	2017-2022	BKPP

3.3.2. Program Prioritas Kelitbangan Bidang Ekonomi

Tabel 3.9. Program-program prioritas kelitbangan bidang ekonomi

Misi	Sasaran		Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat daerah terkait
Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Menurunnya kemiskinan	tingkat	Pemberdayaan masyarakat miskin	2017-2022	DISNAKER
			Pengelolaan data kemiskinan terpadu	2017-2022	DISNAKER
			Pelayanan dasar bagi rakyat miskin	2017-2022	DPUTR
			Penanganan kawasan kumuh	2017-2022	DISPERKIM

Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten	Kapasitas kelembagaan dan budaya kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2018-2022	SETWAN
		Manajemen keuangan dan aset daerah	2017-2022	BPKAD
	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Penerimaan pendapatan asli daerah	2017-2022	BPKAD
Misi 5 : Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.	Meningkatnya kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	Kapasitas lembaga pelatihan kerja daerah	2017-2022	DISNAKER
		Pemetaan angkatan kerja	2017-2022	DISNAKER
		Penguatan kewirausahaan masyarakat	2017-2022	DINKOP & UMKM
	Meningkatnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro (KUM)	Kualitas SDM dan kelembagaan Koperasi dan usaha mikro (KUM)	2017-2022	DINKOP & UMKM, DISDAGPERIN
		Akses kredit KUM	2017-2022	DINKOP & UMKM, DISDAGPERIN
	Pemanfaatan teknologi informasi KUM	2017-2022	DINKOP & UMKM, DISDAGPERIN	

Tabel 3.9. Program-program prioritas kelitbangan bidang ekonomi (lanjutan)

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat daerah terkait
Misi 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi daerah	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi daerah	2017-2022	DISPERTAN, DKP
		Kapasitas SDM dan kelembagaan di sektor pertanian dan perikanan	2017-2022	DISPERTAN, DKP
		Akses kredit dan teknologi untuk pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan	2017-2022	DISPERTAN, DKP
		Penguatan usaha kreatif	2017-2022	DISDAGPERIN
	Meningkatnya Investasi daerah	Penyederhanaan prosedur perijinan usaha	2017-2022	DPMPTSP
	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata daerah	Kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan	2017-2022	DINPORAPAR

Misi 7 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah	Ketahanan daerah	energi	Pemetaan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan	2017-2022	BAPPEDA, DLH, DPUTR
---	------------------	--------	---	-----------	---------------------

3.3.3. Program Prioritas Kelitbangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Tabel 3.10. Program-program prioritas kelitbangan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

Misi	Sasaran		Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat daerah terkait
Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Menurunnya kemiskinan	tingkat	Pelayanan dasar bagi rakyat miskin	2017-2022	DPUTR
			Penanganan kawasan kumuh	2017-2022	DISPERKIM
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten		Kapasitas kelembagaan dan budaya kerja pemerintah daerah	2018-2022	SETDA
				2019-2022	DISKOMINFO

			Penerapan <i>e-government</i> / aplikasi pemerintahan yang terintegrasi		
			Ketepatan pemanfaatan tata ruang sesuai peruntukan	2018-2022	DPUTR
	Meningkatnya pengawasan teknologi informasi	efektifitas berbasis	Kapasitas kelembagaan pengawasan	2017-2022	INSPEKTORAT
Misi 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.	Meningkatnya daerah	investasi	Tata ruang dan infrastruktur untuk mendukung investasi daerah	2017-2022	DPUTR
	Berkembangnya pariwisata daerah	sektor	Sarana dan prasarana kepariwisataan	2017-2022	DPUTR
Misi 7 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah	Meningkatnya infrastruktur dan konektivitas wilayah	kualitas dan	Pengelolaan sumber daya air	2017-2022	DPUTR
			Jaringan dan manajemen transportasi	2017-2022	DPUTR, DISHUB

Tabel 3.10. Program-program prioritas kelitbangan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah (lanjutan)

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat daerah terkait	
Misi 8 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Menurunnya lingkungan	kerusakan	Layanan sampah perkotaan	2017-2022	DPUTR, DLH
			Pencemaran dan kerusakan lingkungan	2017-2022	DLH
			Emisi gas rumah kaca	2017-2022	DLH
			Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	2018-2022	DLH
			Pengelolaan ruang terbuka hijau	2018-2022	DLH
	Menurunkan bencana	resiko	Partisipasi dan kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana (desa tangguh bencana)	2017-2022	BPBD

3.3.3. Program Prioritas Kelitbangan Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek

Tabel 3.11. Program-program prioritas kelitbangan bidang inovasi dan pengembangan Iptek

Misi	Sasaran	Program/kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat daerah terkait
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai basis kebijakan daerah	Penguatan kapasitas kelembagaan perangkat litbang daerah	2017-2022	BAPPEDA
		Pengorganisasian kelitbangan daerah (majelis pertimbangan dan tim pengendali mutu)	2018-2022	BAPPEDA
		Penguatan jaringan kelitbangan (Dewan riset, perguruan tinggi, lembaga litbang, dll)	2017-2022	BAPPEDA
		Kajian isu-isu strategis	2017-2022	BAPPEDA
		Dokumentasi dan publikasi hasil kelitbangan	2017-2022	BAPPEDA
		Asistensi penyusunan naskah akademik peraturan daerah	2018-2022	BAPPEDA

Misi 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.	Meningkatnya inovasi di berbagai sektor khususnya sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan usaha mikro, kecil dan menengah	Penguatan dan pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	2017-2022	BAPPEDA
		Penyusunan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah	2019-2020	BAPPEDA
		Penguatan & penghargaan inovasi daerah (KRENOVA, perlindungan HAKI & IGA)	2017-2022	BAPPEDA
		Kewirausahaan berbasis inovasi teknologi (inkubator bisnis teknologi)	2019-2022	BAPPEDA

Tabel 3.12. Proyeksi kebutuhan Pejabat Fungsional Peneliti

Bidang	Kondisi Sekarang		Kondisi Minimal	
	Jumlah (orang)	Kepakaran	Jumlah (orang)	Kepakaran (tambahan)
Pemerintahan dan Sosial Budaya	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesehatan Masyarakat ▪ Sosiologi Pembangunan ▪ Psikologi 	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Administrasi publik ▪ Sosiologi umum ▪ Kesejahteraan sosial ▪ Demografi formal ▪ Demografi sosial
Ekonomi	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan Publik ▪ Ekonomi SDA 	6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Usaha Pertanian ▪ Sistem Usaha Perikanan ▪ Ekonomi regional ▪ Ekonomi kerakyatan ▪ Manajemen Pariwisata
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknik Lingkungan ▪ Ekologi dan Evolusi 	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan wilayah ▪ Perencanaan dan perancangan kota ▪ Geografi ▪ Teknik transportasi jalan

Inovasi dan Pengembangan Iptek	0	4	<ul style="list-style-type: none">▪ Manajemen penelitian dan pengembangan, teknologi dan inovasi;▪ Kebijakan iptek dan inovasi
--------------------------------	---	---	---

Sumber : Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Bidang Kepakaran Peneliti